

Jalan Poros Kelay Terus Diperbaiki



Sumber gambar : beraupost.jawapos.com

BERAU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus menggenjot pembangunan infrastruktur jalan di sejumlah kampung-kampung. Hal ini mendorong konektivitas kampung, khususnya untuk penunjang daerah-daerah yang menjadi kawasan kampung wisata, seperti Kampung Merasa, Kelay.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menerangkan, pemerintah akan memastikan pembangunan jalan poros menuju Kampung Merasa, Kelay bakal dilanjut.

“Ini untuk mendorong konektivitas kampung-kampung dan memberikan fasilitas yang representatif mendukung kawasan wisata,” ujarnya saat kunjungan ke Kampung Merasa, Kelay

Diketahui, sepanjang 5,7 km dari 11 km jalan poros Kampung Merasa sudah diaspal. Pada tahun ini, kata bupati, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)ⁱ Berau 2024 sudah kembali dituntaskan sepanjang 2 km. “Kita akan dilanjutkan pada APBD Perubahan nanti, secara bertahap hingga penganggaran tahun berikutnya,” paparnya.

Selain peningkatan jalan, terdapat juga pembangunan lima buah gorong-gorong untuk menunjang aksesibilitas jalan senilai Rp13,5 miliar. “Kita akan terus lanjutkan agar bisa teraspal seluruhnya,” untkapnya.

Pembangunan jalan poros menuju Kampung Merasa dikatakannya, membutuhkan proses yang panjang. Sebab pemerintah daerah harus lebih dulu mengurus izin pinjam pakai yang masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) yang dilintasi jalan poros. Namun, dirinya memastikan proses pembangunan ini akan terus berlanjut demi

kenyamanan dan kelancaran masyarakat, dalam beraktivitas dan mendorong peningkatan perekonomian masyarakat kampung.

Pemkab Berau ditegaskannya berkomitmen memberikan perhatian serius dalam pembangunan kampung. Terutama dalam pemenuhan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Selain peningkatan jalan poros hingga aspal, Sri mengatakan juga memberi atensi organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk terus menginventarisasi kebutuhan masyarakat di kampung.

“Selain jalan poros, infrastruktur dasar lainnya juga menjadi perhatian, ini komitmen kami,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Junaidi menerangkan, dari total ruas jalan yang diaspal, masih tersisa 5,2 km yang saat ini kondisinya berupa konstruksi keras berbutir atau pasir dan batu (sirtu). Pada tahun 2023 lalu, jalan poros ini dikucur anggaran Rp13,5 miliar dan mendapat anggaran lagi pada tahun ini. Bahkan, pada APBD Perubahan nanti, pihaknya akan melakukan pengusulan kembali.

“Semoga secara bertahap Jalan Poros Merasa dapat dituntaskan pengaspalannya,” ungkapnya. (sen/kpg/rdh)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Jalan Poros Kelay Terus Diperbaiki, 01/07/24
2. beraupost.jawapos.com, Peningkatan Jalan Poros Kelay Dikebut, 01/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 diatur mengenai penyelenggaraan jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi pembangunan jalan berkelanjutan
2. Dalam Pasal 7 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Perda 6/2023) diatur bahwa Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp5.074.960.000.000,00 (lima triliun tujuh puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah), yang terdiri dari belanja modal.
3. Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d Perda 6/2023 diatur bahwa anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar

Rp2.628.037.108.244,00 (dua triliun enam ratus dua puluh delapan miliar tiga puluh tujuh juta seratus delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri dari belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.

ⁱ Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.